

**PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI)
JAKARTA TIMUR**

INTISARI

Ade Yunita¹ dan I Gusti Agung Made Wardana²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani serta bagaimana seharusnya pengaturan dan pelaksanaan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial dibandingkan dengan beberapa Negara lain.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan maksud agar data yang diambil lebih banyak dan variatif sehingga informasi yang di dapat cukup lengkap, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk dianalisis dan disimpulkan pada akhir penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di PSMP Handayani yaitu, identifikasi dan penerimaan, pengasramaan, orientasi, assesmen, perumusan rencana intervensi, bimbingan fisik, mental, sosial dan ketrampilan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, terminasi, pengarsipan data klien, pengarsipan data klien dilakukan mulai tahap penerimaan. Hal yang perlu diatur oleh BRSAMPK Handayani dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah SOP (standar operasional prosedur) berkaitan dengan ABH yang kabur, ABH yang melakukan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa orangtua asuh, ABH yang berasal dari Lapas kemudian ditempatkan di LPKS dan Penyidik yang menitipkan anak dengan waktu yang tidak jelas, hal ini penting untuk membangun komitmen bersama, memperkuat kordinasi dan kerjasama, mengutamakan peningkatan kepentingan anak dalam mengambil kebijakan, sehingga tujuan dalam rangka melindungi dan mengayomi ABH agar dapat menyongsong masa depannya serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara dan diharapkan tidak mengulangi tindak pidana lagi bisa tercapai.

***Kata Kunci:* Anak yang Berkonflik dengan Hukum, BRSAMPK Handayani.**

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Kampus Jakarta.

² Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi FH UGM Yogyakarta.

**ROLE OF INSTITUTIONALIZING THE SOCIAL WELFARE IN
CONSTRUCTION OF CHILDREN AGAINST LAW
(CASE STUDY OF PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA HANDAYANI)
EAST JAKARTA**

ABSTRACT

By

Ade Yunita³ and I Gusti Agung Made Wardana⁴

This study aims to find out and analyze the Implementation of the Advancement of Children Against Law in the Marsudi Putra Handayani Social Institution and how should the regulation and implementation of the coaching of children facing law in the Institution of Social Welfare Development compared to several other countries.

The research method used in this thesis is an empirical normative research method with the intention that the data taken is more varied and varied so that the information can be sufficiently complete, then the data are analyzed qualitatively with a descriptive analytical method to be analyzed and concluded at the end of the study.

Based on the results of research and discussion concluded as follows: Implementation of ABH coaching in PSMP Handayani namely, identification and acceptance, familiarization, orientation, assessment, formulation of intervention plans, physical, mental, social and skills guidance, resocialization, distribution, further guidance, archiving, archiving client data, client data archiving is done from the receiving stage. Things that need to be regulated by BRSAMPK Handayani in handling children who need special protection are SOP (standard operational procedures) relating to runaway ABH, ABH who take actions that threaten the lives of foster parents, ABH who come from prisons and then are placed in LPKS and Investigators who are entrust children with unclear time, this is important to build mutual commitment, strengthen coordination and cooperation, prioritize increasing the interests of children in making policies, so that the goals in order to protect and nurture ABH in order to meet their future and provide opportunities for children to through guidance his identity will be obtained to become an independent, responsible and useful person for himself, his family, community, nation and state and is expected to not repeat the crime again can be achieved.

Keywords: Children Facing the Law, BRSAMPK Handayani.

³ Post Graduate Student Faculty of Law Gadjah Mada University, Jakarta

⁴ Lecturer at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta